



PENGARUH DIMENSI KEBIJAKAN PIMPINAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

Celiani

Program Pascasarjana STIA Bina Banua Banjarmasin

cellianibinabanua@gmail.com

Muhammad Akbar

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin

Muhammad.akbar@stiabinabanuabjm.ac.id

Anhar Yani

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin

Anhar.yani@stiabinabanuabjm.ac.id

Abstract

*This study aims to: 1) To analyze the influence of leadership policy from the aspect of policy issues on the performance of the organization of the Regional Finance and Asset Management Office of East Barito Regency, 2) To analyze the influence of leadership policy from the alternative aspect of the policy on the performance of the organization of the District Financial Management and Asset Office East. 3) To analyze the influence of leadership policy from the aspect of policy action on the performance of the organization of the Regional Finance and Asset Management Office of East Barito Regency, 4) To analyze the influence of the leadership policy from the aspect of the policy result to the performance of the organization of the Regional Finance and Asset Management Office of East Barito Regency. This research is a quantitative descriptive research. The population in this study is all employees at the Office of Management of Finance and Assets Region of East Barito Regency as many as 59 (fifty nine) people. **Keywords:** Leadership Policy, Organizational Performance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pimpinan dari aspek masalah kebijakan terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2) Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pimpinan dari aspek alternatif kebijakan terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur. 3) Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pimpinan dari aspek tindakan kebijakan terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 4) Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pimpinan dari aspek hasil kebijakan terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur yaitu sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang.

Kata kunci : Kebijakan Pimpinan, Kinerja Organisasi



PENDAHULUAN

Keberhasilan sebuah organisasi tidak lepas dari eksistensi pimpinan. Pimpinan merupakan seorang yang mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan dan mengimplemen-tasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat/ menjadi sebuah keputusan dalam organisasi. Ia mempunyai keku-asaan yang luas untuk menentukan segala kebi-jakan yang harus dijalan-kan dalam rangka pencapaian tujuan. Pemimpin mempunyai wewenang penuh untuk me-ngarahkan kegiatan para anggotanya, namun anggota tidak mempunyai power untuk mengarahkan kepemimpinan secara langsung. Kepemim-pinan yang kuat dan mana-jemen yang kuat penting untuk keefektifan organisasi secara optimal.

Banyak kajian tentang keorga-nisasian yang menyoro-ti masalah faktor-faktor yang mempengaruhi ki-nerja organisasi. Faktor yang sangat umum dan hampir selalu dikaji dalam penilaian kinerja adalah faktor kebi-jakan kepemimpinan. Sebab sebagai faktor yang mengarahkan organisasi, Kebi-jakan kepemimpinan sangat menentukan kemajuan dan kemun-duran organisasi (Mas'ud, 2014:76). Peran kepemimpinan dalam membuat kebijakan tidak hanya tentang arah suatu organisasi yang kuat di mana permasalahan dan solusi banyak dike-tahui, tetapi peran kepemimpinan mengambil bagian dalam suatu kon-teks perubahan, dalam perubahan yang terus menerus dan tidak menentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Ruky (2011:7) yang mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah kepe-mimpi-nan sebagai upaya untuk meng-en-dalikan anggota organisasi agar beker-ja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.

Berbagai upaya dilakukan seorang pimpinan untuk mempenga-ruhi pegawainya agar dapat melaku-kan pekerjaan sesuai konsep yang telah direncanakan, diantaranya de-ngan memberika pujian, memberikan penghargaan, memberikan motivasi dan memberikan tekanan terhadap pegawainya. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktifitas kelompok yang terorganisir untuk mencapai sasaran Rauch dan Behling dalam Yukl (2013:46). Kepemimpinan menggambarkan hubungan antara yang dipimpin dengan yang memim-pin dan bagaimana seseorang menga-rahkan yang dipimpin. Pemimpin dapat mempengaruhi prilaku para bawahan melalui pendekatan dalam mengelola manusia. Untuk itu organisasi perlu motor penggerak perubahan organisasi dan pemimpin yang mampu menetapkan sasaran-sasaran khusus, memonitor perkem-bangan, dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang dapat mendorong atau memotivasi bawahannya, menu-mbuhkan sikap positif bawahan pada pekerjaan organisasi dan mudah menyesuaikan pada segala situasi.

Pada dasarnya kegiatan ma-nusia secara bersama-sama membu-tuhkan pemimpin Terry (2013:227) menyebutkan keberhasilan dan kega-galan sebuah organisasi dalam menja-lankan misinya sangat tergantung kepada tanggung jawab dari seorang pemimpin. Untuk itu kepemimpinan dapat diartikan sebagai sebuah akti-vitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai suatu tujuan organisasi. Lebih lanjut Thoha mengemukakan bahwa seorang pemi-mpin apapun wujudnya, dimanapun letaknya akan selalu mempunyai beban untuk mempertanggung jawab-kan kepemimpinannya. Dengan memperhatikan arti pentingnya kepemimpinan dalam su-atu organisasi khususnya pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, penulis melakukan penelitian dengan memfokuskan sejauh mana kepe-mimpinan Dinas



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur dalam meningkatkan kinerja Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan kepemimpinan seperti-nya menggunakan kombinasi berbagai gaya kepemimpinan yang dapat dilihat dari cara Kepala Dinas dalam mengambil keputusan yang terkadang melibatkan pegawai, namun tidak jarang mengambil keputusan sendiri. Disamping itu dalam mendelegasikan tugas kepada pegawai terkadang ada yang tidak sesuai dengan posisi atau jabatan dari pegawai yang disertai tugas, artinya Kepala Dinas dalam mendelegasikan tugas tidak berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi bawahan. Hal inilah yang terkadang menimbulkan permasalahan karena belum tentu pegawai yang disertai tugas memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan kepala dinas, sehingga pada akhirnya kinerja dari pegawai bersangkutan khususnya berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh pimpinan menjadi kurang maksimal.

Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Surjadi,2014:7).

Menurut Baban Sobandi (2012: 176) Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact.

Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

Berikut adalah indikator kinerja organisasi menurut baban sobandi (2012: 179-181):

1. Pertama, keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kelompok keluaran (output) meliputi dua hal. Pertama, kualitas pelayanan yang diberikan, indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan. Kedua, kuantitas pelayanan yang diberikan yang memenuhi persyaratan kualitas tertentu. Indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan yang memenuhi uji kualitas.
2. Kedua, hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan.segala sesuatu yang mencerminkan ber-fungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
3. Ketiga, kaitan usaha dengan pencapaian adalah ukuran efisiensi yang mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. Berdasarkan pengertian diatas, maka Mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, danmemberi informasi tentang keluaran di tingkat tertentu dari penggunaan sumber daya, menunjukkan efisiensi relatif suatu unit jika dibandingkan dengan



hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara internal, norma atau standar yang bisa diterima atau hasil yang bisa dihasilkan setara. Indikator yang mengaitkan usaha dengan penca-paian, meliputi dua hal. Pertama, ukuran efisiensi yang mengaitkan usaha dengan keluaran pelayanan, indikator ini mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran ditingkat tertentu dari penggunaan sumber daya di lingkungan organisasi. Kedua, ukuran biaya hasil yang menghubungkan usaha dan hasil pelayanan, ukuran ini melaporkankan biaya per unit hasil, dan mengaitkan biaya dengan hasil sehingga manajemen publik dan masyarakat bisa mengukur nilai pelayanan yang telah diberikan.

4. Keempat, informasi penjas adalah suatu informasi yang harus disertakan dalam pelaporan kinerja yang mencakup informasi kuantitatif dan naratif. Membantu pengguna untuk memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja suatu organisasi, dan mengevaluasi signifikansi faktor yang akan mempengaruhi kinerja yang dilaporkan. Ada dua jenis informasi penjas yaitu pertama, faktor substansial yang ada diluar kontrol seperti karakteristik lingkungan dan demografi. Kedua, faktor yang dapat dikontrol seperti pengadaan staf.

Kebijakan Pimpinan

Pengertian Policy atau kebijakan, Donovan dan Jackson dalam Keban (2014: 55) menjelaskan bahwa policy dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Sementara James E. Anderson dalam Wahab (2013:2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pendapat yang lain adalah dari Carl Friedrich dalam Wahab (2013:2) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Henry dalam Kartono (2011:33) berpendapat bahwa pemimpin dalam arti luas ialah seorang yang memimpin, dengan jalan memperkarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain, atau



melalui prestise, kekuasaan atau posisi. Sedangkan dalam pengertian ter-batas, pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan ban-tuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan eksepsi/penerimaan secara suka rela oleh pengikutnya.

William N. Dunn (2012: 21) membedakan sebuah kebijakan terma-suk kebijakan pimpinan dapat diukur melalui indikator, yaitu:

1. Masalah kebijakan (policy public)
2. Alternative kebijakan (policy alternatives)
3. Tindakan kebijakan (policy actions)
4. Hasil kebijakan (policy outcomes)

Implementasi kebijakan menu-rut Dunn (2012:132), mengemukakan implementasi kebijakan yaitu: “Pelak-sanaan pengendalian aksi-aksi kebi-jakan di dalam kurun waktu tertentu”. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas praktis yang mengarah pada pemilihan tindakan dan pengamatan sampai selesainya waktu pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Imple-mentasi kebijakan dibedakan dari for-mulasi kebijakan yang dapat dipan-dang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Implementasi kebijakan ter-masuk kebijakan yang ditetapkan oleh seorang pemimpin merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui.

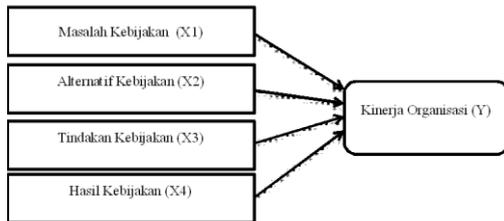
Implementasi kebijakan sangat menentukan apakah organisasi akan berhasil atau gagal untuk mencapai tujuan sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan tersebut sebelumnya. Oleh karena itu implementasi kebi-jakan berkaitan erat dengan waktu tertentu dalam pelaksanaannya, de-ngan kata lain adanya target yang di-arahkan untuk dilaksanakan. Proses implementasi suatu kebijakan dibutuh-kan adanya komponen implementasi kebijakan yaitu unsur pelaksana, prog-ram dan kelompok sasaran. Unsur pelaksana adalah orang-orang yang berkewajiban untuk melak-ukan tinda-kan dan menggunakan saran bagi tercapainya tujuan suatu kebijakan, yang dapat berbentuk organisasi pem-erintah. Pihak yang terutama mempu-nyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan Publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik. Unit-unit administratif atau unit-unit birokratik ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan proses kebijakan Publik dilakukan. Dalam implementasi kebijakan memiliki diskresi mengenai instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan. Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang dimili-kinya melakukan berbagai tindakan, mulai dari penentuan tujuan dan sa-saran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi org-anisasi, pengambilan keputusan, pe-rencanaan, penyusunan program, pe-ngorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan dan penilaian.

Haryadi (2015) dalam peneli-tiannya mengungkapkan bahwa sebu-ah kebijakan memberikan pengaruh besar terhadap kinerja sebuah orga-nisasi, oleh sebab itu pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan, sehi-ngga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Kerangka Pikir Penelitian

Adapun Kerangka Pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :





Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Hipotesis Penelitian

1. Kebijakan pimpinan dari dimensi masalah kebijakan berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur
2. Kebijakan pimpinan dari dimensi alternatif kebijakan berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur
3. Kebijakan pimpinan dari dimensi tindakan kebijakan berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur
4. Kebijakan pimpinan dari dimensi hasil kebijakan berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Alasan digunakannya pendekatan kuantitatif adalah untuk menganalisis kuesioner yang dibagikan kepada pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur yang digunakan untuk mengukur kebijakan pimpinan dan kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kebijakan Pimpinan terhadap kinerja Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur

Tujuan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemandirian fiskal daerah dengan cara meningkatkan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembang jiwa profesionalisme kerja aparat, dan mendorong arah penggunaan keuangan yang jelas sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat;
3. Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan dan penataan aset yang baik, jelas serta terarah, termasuk meningkatkan perencanaan pengadaan barang milik daerah serta pengamanan administratif terhadap barang



milik daerah.

Sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur

Adapun sasaran secara umum pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur adalah sebagai :

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah persentase Pendapatan Asli Daerah dengan tahun lalu;
 - b. Jumlah persentase dana perimbangan dengan tahun lalu;
 - c. Jumlah persentase pendapatan.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi keuangan dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase kepuasan masyarakat dalam pengrusan keuangan;
 - b. Persentase penyerapan dana APBD setiap SKPD;
 - c. Persentase penyelesaian opini BPK-RI setiap tahunnya.
3. Mengoptimalkan penatausahaan aset dengan tetap mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Terpenuhinya sistem dan prosedur pengadaan, pencatatan atas pema-nfaatan, dan penyusunan barang milik daerah;
 - b. Terpenuhinya penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh instansi lain;
 - c. Persentase penyelesaian opini BPK-RI setiap tahunnya khususnya mengenai pengelolaan aset.

Program Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur

Berikut ini merupakan 6 (enam) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Peneli-tian

Masrun (1979) dalam Sugiyono (2014:106) menyatakan syarat mini-mum untuk dianggap memenuhi syarat adalah apabila $r = 0,3$. Jadi apabila korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3, maka butir dalam instru-ment tersebut dinyatakan tidak valid. Adapun hasil uji validitas instrumen dalam peneli-tian menya-takan bahwa seluruh item pernyataan yang ada dalam kuesioner variabel kebijakan pimpinan dan kinerja organisasi seluruhnya dinyatakan valid karena memiliki nilai Corrected Item Total Correlation lebih dari 0,3.

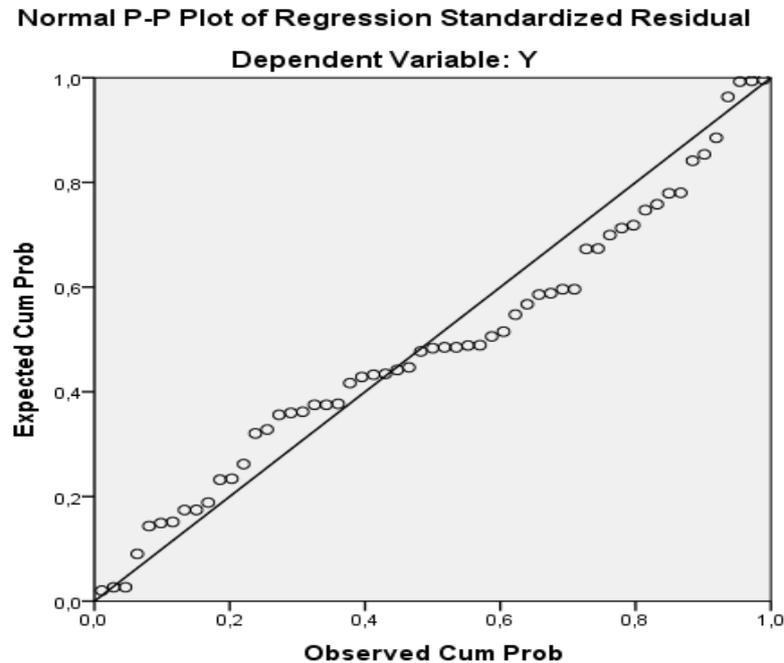
Hasil uji reliabilitas menun-jukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel kare-na memiliki nilai cronbach Alpha diatas 0,6. Dengan demikian, maka kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan dapat digunakan untuk mengukur variabel kebijakan pimpinan (X) yang terdiri dari : Masalah Kebijakan (X1), Alternatif



Kebijakan (X2), Tindakan Kebijakan (X3) dan Hasil Kebijakan serta Kinerja Organisasi (Y) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.

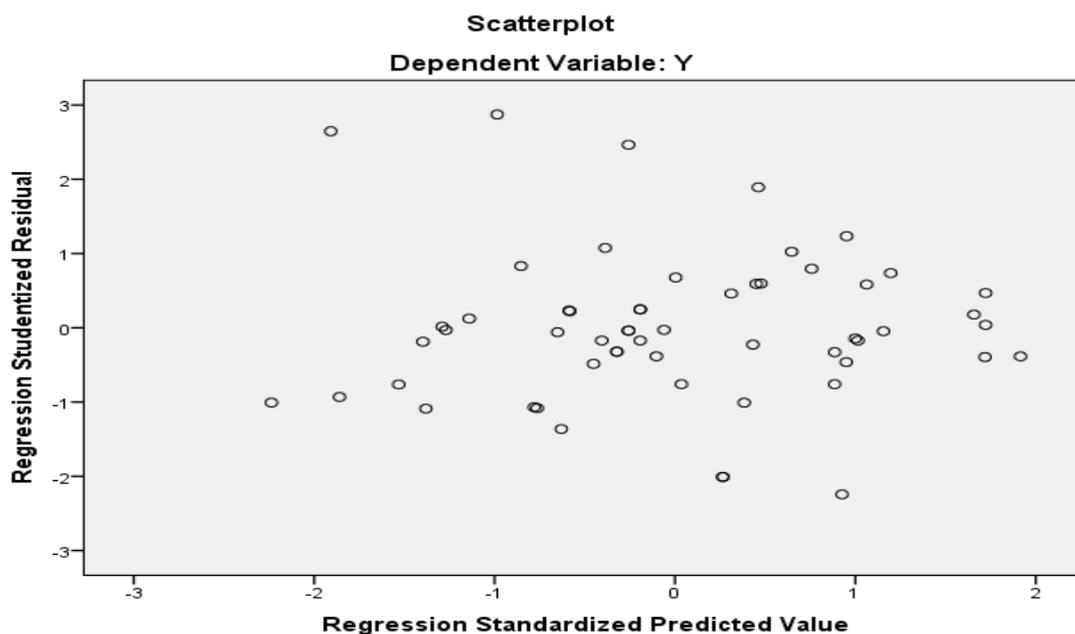
Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk hasil uji normalitas data dalam penelitian dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Dari analisis kurva pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar diagram dan mengikuti model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi.

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode grafik plot Reg-ression Standarized Predicted Value dengan Regression Studentized Residual. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Berdasarkan grafik scatterplot diatas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, dengan kata lain pada model regresi terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi ini telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas, hal ini menunjukkan bahwa variasi data homogen.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai Value Inflation Factor (VIF). Apabila nilai $VIF > 10$, terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika $VIF < 10$, tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Variance Inflation Factor (VIF) yaitu Masalah Kebijakan (X1) mempunyai nilai VIF sebesar 1,373, Alternatif Kebijakan (X2) mempunyai nilai VIF sebesar 3,812, Tindakan Kebijakan (X3) mempunyai nilai VIF sebesar 3,867 dan Hasil Kebijakan (X4) mempunyai nilai VIF sebesar 1,446. Artinya masing-masing dimensi variabel Kebijakan Pimpinan yang terdiri dari Masalah kebijakan (X1), Alternatif Kebijakan (X2), Tindakan Kebijakan (X3) dan Hasil Kebijakan (X4) sama-sama memiliki nilai VIF lebih dari 10. Menurut Ghozali (2012:92) apabila nilai $VIF < 10$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi berganda membentuk persamaan regresi sebagai berikut:
 $Y = 8,974 + 0,100 X_1 + 0,404 X_2 + 0,291 X_3 + 0,307 X_4$

Nilai konstanta 8,974 berarti bahwa tanpa adanya faktor kebijakan pimpinan yang terdiri dari masalah kebijakan, alternatif kebijakan, tindakan kebijakan dan hasil kebijakan, kinerja organisasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur adalah sebesar 8,974%.

Nilai koefisien regresi sebesar 0,100 pada variabel kebijakan pimpinan indikator masalah kebijakan (X1) berarti bahwa apabila masalah kebijakan meningkat, maka kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur juga akan mengalami peningkatan sebesar 10%.

Nilai koefisien regresi sebesar 0,404 pada variabel kebijakan pimpinan indikator alternatif kebijakan (X2) berarti bahwa apabila alternatif kebijakan meningkat, maka kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur juga akan mengalami peningkatan sebesar 40,4%.

Nilai koefisien regresi sebesar 0,291 pada variabel kebijakan pimpinan indikator tindakan kebijakan (X3) berarti bahwa apabila tindakan kebijakan meningkat, maka kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur juga akan mengalami peningkatan sebesar 29,1%.

Nilai koefisien regresi sebesar 0,307 pada variabel kebijakan pimpinan indikator hasil kebijakan (X4) berarti bahwa apabila hasil kebijakan meningkat, maka kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur juga akan mengalami peningkatan sebesar 30,7%.

Analisis Determinasi



Koefisien determinan (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2012:83). Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Nilai Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,905 ^a	,819	,805	2,42369	,819	58,637	4	52	,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data, SPSS 21, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program SPSS 21 pada tabel 4.17 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted R²) yang diperoleh sebesar 0,805. Hal ini berarti 80,5% kinerja organisasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur dapat dijelaskan oleh variabel kebijakan pimpinan yang terdiri dari Masalah Kebijakan (X1), Alternatif Kebijakan (X2), Tindakan Kebijakan (X3) dan Hasil Kebijakan (X4), sedangkan sisanya 19,5% kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian.

Pengaruh Kebijakan Pimpinan Dari dimensi Masalah Kebijakan Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.

Masalah Kebijakan merupakan salah satu indikator dari variabel Kebijakan pimpinan. Masalah kebijakan dapat dianggap sebagai nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan apa yang hendak dipertanyakan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masalah Kebijakan (X1) memiliki nilai rata-rata 3,99 yang berarti bahwa perumusan kebijakan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur berakar dari sebuah permasalahan yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur sendiri. Disamping itu pimpinan yaitu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur mengetahui alasan perlunya penetapan sebuah kebijakan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.

Sebagai bagian dari Kebijakan Pimpinan, tentunya masalah kebijakan dianggap atau diduga turut menentukan kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur. Pengaruh kebijakan pimpinan dari dimensi masalah kebijakan terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur dapat diketahui dengan melakukan uji t. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan signifikansi 95% ($\alpha=0,05$), jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan sebaliknya jika t hitung < t tabel maka Ho diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2
 Hasil Uji t Pengaruh Variabel Kebijakan Pimpinan dari dimensi Masalah Kebijakan terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur

Variabel	t hitung	t tabel	Koefisien Regressi	Sig.	Keterangan
Masalah Kebijakan (X1)	1,444	2,00324	0,100	0,155	Tidak Signifikan

Sumber : Hasil Pengolahan Data, SPSS 21, 2017

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Variabel Kebijakan Pimpinan indikator Masalah Kebijakan (X1), nilai t hitung sebesar 1,444 sedangkan t tabel sebesar 2,00324 dengan signifikansi sebesar 0,154. Karena t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,444 < 2,00324$) atau $\text{sig } t > 5\%$ ($1,55 < 0,05$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel kebijakan pimpinan indikator masalah kebijakan (X1) terhadap Kinerja Organisasi (Y) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur. Dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi “Kebijakan pimpinan dari dimensi masalah kebijakan berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur” dinyatakan Ditolak.

Pengaruh Kebijakan Pimpinan Dari dimensi Alternatif Kebijakan Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.

Alternatif Kebijakan merupakan salah satu indikator dari variabel Kebijakan pimpinan. Alternatif kebijakan dapat dikatakan sebagai arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat member sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alternatif Kebijakan (X2) memiliki nilai rata-rata 4,17 yang berarti bahwa Kebijakan yang dibuat oleh pimpinan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur dapat dimanfaatkan untuk men-capai nilai kebijakan dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.

Sebagai bagian dari Kebijakan Pimpinan, alternatif kebijakan diang-gap atau diduga turut menentukan kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabu-paten Barito Timur. Pengaruh kebi-jakan pimpinan dari dimensi alternatif kebijakan terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur dapat diketahui dengan melakukan uji t. Uji t dapat dilakukan dengan membandi-ngkan nilai t hitung dengan t tabel dengan signifikansi 95% ($\alpha=0,05$), jika t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan sebaliknya jika t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3
Hasil Uji t Pengaruh Variabel Kebijakan Pimpinan dari dimensi Alternatif Kebijakan terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur

Variabel	t hitung	t tabel	Koefisien Regressi	Sig.	Keterangan
Alternatif Kebijakan (X2)	3,506	2,00324	0,404	0,001	Signifikan

Sumber : Hasil Pengolahan Data, SPSS 21, 2017

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa Variabel Kebijakan pimpinan indikator Alternatif Kebijakan (X2), nilai t hitung sebesar 3,506 sedangkan t tabel sebesar 2,00324 dengan signifikansi sebesar 0,001. Karena t hitung > t tabel ($3,506 > 2,00324$) atau $\text{sig } t < 5\%$ ($0,001 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kebijakan pimpinan indikator Alternatif Kebijakan (X2) terhadap Kinerja Organisasi (Y) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur. Dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi “Kebijakan pimpinan dari dimensi alternatif kebijakan berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur” dinyatakan Diterima

Pengaruh Kebijakan Pimpinan Dari dimensi Tindakan Kebijakan Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.

Tindakan kebijakan merupakan salah satu dari indikator Kebijakan Pimpinan. Tindakan kebijakan suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindakan Kebijakan (X3) memiliki nilai rata-rata 4,11 yang berarti bahwa pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Kepala dinas sebagai pimpinan tertinggi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur disertai pengawasan yang langsung dilakukan oleh kepala Dinas selaku pimpinan dan pembuat kebijakan. Disamping itu kebijakan yang telah dibuat oleh Kepala Dinas tidak dilaksanakan secara sekaligus, melainkan dilaksanakan secara bertahap. Tahapan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh Kepala Dinas dimaksudkan agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut

Sebagai bagian dari Kebijakan Pimpinan, tindakan kebijakan dianggap atau diduga turut menentukan kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur. Pengaruh kebijakan pimpinan dari dimensi tindakan kebijakan terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur dapat diketahui dengan melakukan uji t. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan signifikansi 95% ($\alpha=0,05$), jika t hitung > t tabel maka H_0 ditolak dan sebaliknya jika t hitung < t tabel maka H_0 diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 4
Hasil Uji t Pengaruh Variabel Kebijakan Pimpinan dari dimensi Tindakan Kebijakan terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur

Variabel	t hitung	t tabel	Koefisien Regressi	Sig.	Keterangan
Tindakan Kebijakan (X3)	2,508	2,00324	0,291	0,015	Signifikan

Sumber : Hasil Pengolahan Data, SPSS 21, 2017

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Variabel Kebijakan pimpinan indikator Tindakan Kebijakan (X3), nilai t hitung sebesar 2,508 sedangkan t tabel sebesar 2,00324 dengan signifikansi sebesar 0,015. Karena $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2,508 > 2,00324$) atau $\text{sig } t < 5\%$ ($0,015 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kebijakan pimpinan indikator Tindakan Kebijakan (X3) terhadap Kinerja Organisasi (Y) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur. Dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi “Kebijakan pimpinan dari dimensi tindakan kebijakan berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur” dinyatakan Diterima.

Pengaruh Kebijakan Pimpinan Dari dimensi Hasil Kebijakan Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.

Hasil kebijakan merupakan salah satu dari indikator Kebijakan Pimpinan. Hasil kebijakan adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil Kebijakan (X4) memiliki nilai rata-rata 4,12 yang berarti bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan yaitu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur mampu menjadi alternatif solusi guna mengatasi permasalahan yang terjadi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur. Disamping itu dengan ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan yang telah dibuat oleh pimpinan ternyata mampu menstabilkan kondisi organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur. Hal ini terjadi karena kebijakan pimpinan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.

Sebagai bagian dari Kebijakan Pimpinan, hasil kebijakan dianggap atau diduga turut menentukan kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur. Pengaruh kebijakan pimpinan dari dimensi hasil kebijakan terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten



Barito Timur dapat diketahui dengan melakukan uji t. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan signifikansi 95% ($\alpha=0,05$), jika t hitung > t tabel maka H_0 ditolak dan sebaliknya jika t hitung < t tabel maka H_0 diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Hasil Uji t Pengaruh Variabel Kebijakan Pimpinan dari dimensi Hasil Kebijakan terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur

Variabel	t hitung	t tabel	Koefisien Regresi	Sig.	Keterangan
Hasil Kebijakan (X4)	4,328	2,00324	0,307	0,000	Signifikan

Sumber : Hasil Pengolahan Data, SPSS 21, 2017

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Variabel Kebijakan pimpinan indikator Hasil Kebijakan (X3), nilai t hitung sebesar 4,328 sedangkan t tabel sebesar 2,00324 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena t hitung > t tabel (4,328 > 2,00324) atau sig t < 5% (0,000 < 0,05), maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kebijakan pimpinan indikator Hasil Kebijakan (X4) terhadap Kinerja Organisasi (Y) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur. Dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi “Kebijakan pimpinan dari dimensi hasil kebijakan berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur” dinyatakan Diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Okmayasie (2014) yang menyatakan bahwa kebijakan pimpinan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Demikian pula penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zaitinnor (2015) yang menyatakan bahwa Kebijakan Pimpinan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tilekson (2016) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan kepala dinas berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Implementasi kebijakan menurut Dunn (2012:132), mengemukakan implementasi kebijakan yaitu: “Pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu”. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas praktis yang mengarah pada pemilihan tindakan dan pengamatan sampai selesainya waktu pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi kebijakan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Implementasi kebijakan termasuk kebijakan yang ditetapkan oleh seorang pemimpin merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui.

Implementasi kebijakan sangat menentukan apakah organisasi akan berhasil atau gagal untuk mencapai tujuan sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan tersebut sebelumnya. Oleh karena itu implementasi kebijakan berkaitan erat dengan waktu tertentu dalam pelaksanaannya, dengan kata lain adanya target yang diarahkan untuk dilaksanakan.

Proses implementasi suatu kebijakan dibutuhkan adanya komponen



implementasi kebijakan yaitu unsur pelaksana, program dan kelompok sa-saran. Unsur pelaksana adalah orang-orang yang berkewajiban untuk me-lakukan tindakan dan menggunakan saran bagi tercapainya tujuan suatu ke-bijakan, yang dapat berbentuk orga-nisasi pemerintah. Pihak yang teru-tama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan Publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik. Unit-unit administratif atau unit-unit birokratik ini berfungsi se-bagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan proses kebi-jakan Publik dilakukan. Dalam imple-mentasi kebijakan memiliki diskresi mengenai instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan. Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang dimilikinya melakukan berbagai tindakan, mulai dari penentuan tujuan dan sasaran orgnisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manu-sia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan dan penilaian.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kebijakan pimpinan dari di-mensi masalah kebijakan mem-berikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur. Artinya meskipun terjadi peni-ngkatan pada aspek masalah ke-bijakan, kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur tidak akan mengalami peruba-han.
2. Kebijakan pimpinan dari di-mensi alternatif kebijakan mem-berikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ka-bupaten Barito Timur. Artinya apabila terjadi peningkatan pada alternatif kebijakan, maka kine-rja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur juga akan mengalami peningkatan.
3. Kebijakan pimpinan dari dime-nsi tindakan kebijakan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja orga-nisasi Dinas Pengelolaan Keua-ngan dan Aset Daerah Kabupa-ten Barito Timur. Artinya apa-bila terjadi perbaikan pada aspek tindakan kebijakan, maka kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur juga akan mengalami peningkatan.
4. Kebijakan pimpinan dari dime-nsi hasil kebijakan memberikan pengaruh yang positif dan sig-nifikan terhadap kinerja organi-sasi Dinas Pengelolaan Keuang-an dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur. Artinya apabila terjadi peningkatan pada aspek hasil kebijakan, maka kinerja or-ganisasi Dinas Pengelolaan Keu-angan dan Aset Daerah Kabupa-ten Barito Timur juga akan me-ngalami peningkatan.

Saran

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dominan diberi-kan oleh faktor alternatif kebija-kan, maka yang perlu dilakukan oleh pimpinan adalah merumus-kan serta menetapkan berbagai kebijakan bagi organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur yang bersifat lebih fleksibel



sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi organisasi.

2. Hendaknya pimpinan dalam menetapkan kebijakan lebih mengutamakan kepentingan organisasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu memberikan dampak positif bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan kinerja organisasi, namun sebaiknya penelitian selanjutnya mengangkat variabel lain, selain kebijakan pimpinan yang kemungkinan berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji.* 2014. *Manajemen Abad 21.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi.* 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Armosudiro, Pradjudi.* 2012. *Konsep Organisasi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bastian, Indra,* 2011, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar,* Jakarta: Erlangga.
- Djatmiko, Yayat Hayati.* 2013. *Perilaku Organisasi.* Bandung : CV. Alfabeta.
- Dunn, William N,* 2012. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Gibson, James L.* 2013. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses.* Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Malayu S.P.* 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini.* 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yermias T.* 2014. *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik, Konep, Teori, dan Isu.* Yogyakarta: Gava Media.
- Kurniawan, Albert.* 2013. *Belajar mudah SPSS untuk pemula.* Yogyakarta: Mediakom.
- Mangkunegara, Anwar Prabu.* 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.* Bandung: Refika Aditama.
- Martha Andy P., Bambang Swasto S., dan Djamhur H.* 2011, *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional Terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada karyawan tetap PT. Mustika Bahana Jaya, Lumajang).*
- Maryati, Sri.* 2012. *Tesis Pengaruh Kejelasan Tujuan, Kepemimpinan dan Kinerja Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.*
- Mas'ud, Fuad,* 2014. *Survai Diagnosis Organisasional, konsep dan. Aplikasi,* Semarang : BP Undip.
- Nawawi, Hadari.* 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif.* Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press.
- Rivai, Veithzal.* 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan.* Jakarta: Raja Grafindo.
- Robbins, Stephen P.* 2013. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi.* Jakarta: Erlangga.
- Ruky, Achmad S.* 2011. *Sistem Manajemen Kinerja.* Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono,* 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND.* Bandung : Alfabeta.



- Suyanto*. 2013. *Mengenal Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan di Rumah. Sakit*. Jogjakarta : Mitra Cendikia
- Terry, George dan Leslie W. Rue*. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tilekson*, 2016. *Pengaruh Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur*.
- Wahab, Solichin Abdul*. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press.
- Yukl, Gary*. 2013, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Edisi Kelima. Jakarta: Indeks.
- Zaitinnor*, 2015. *Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Dinas Pertanian Taaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Tengah*.

